



Peran Program Corporate Social Responsibility Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Bangun Sari Kabupaten Muara Enim

Farid Wadji

faridwadji30@gmail.com

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Aprin

Article Info

Kata Kunci :
CSR (Corporate Social Responsibility), Pemberdayaan Ekonomi, Masyarakat

Abstrak

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru dalam pembangunan yaitu bersifat people centered, participatory, empowering and sustainable. Judul jurnal ini adalah Peran Program Corporate Social Responsibility dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Bangun Sari Kabupaten Muara Enim oleh PT. Medco E & P Lematang yang bertujuan 1). mengetahui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility dalam pemberdayaan ekonomi di Desa Bangun Sari. 2). Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat kinerja Pemerintah Desa Bangun Sari dalam pemberdayaan ekonomi. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian 1). Rangkaian pengembangan kapasitas dalam Corporate Social Responsibility yang terdiri dari kegiatan sosialisasi, pelaksanaan siklus, dan pelatihan di Desa Bangun Sari telah dijalankan dengan baik, dengan menggunakan pendekatan sosio-kultural yaitu dengan memperhatikan aspek keagamaan, aspek gender dan kebiasaan sehari-hari masyarakat. 2). Faktor Sikap dan cara pandang masyarakat Desa Bangun Sari terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tergolong baik atau tinggi. Sikap dan cara pandang masyarakat tersebut secara umum tidak dipengaruhi oleh golongan usia, tingkat pendidikan dan perannya dalam kegiatan program namun lebih banyak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Kualitas keterlibatan, peran dan tanggapan kaum perempuan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih lebih

faridwadji30@gmail.com

Jurnal Ilmiah Manajemen – Vol : 11.1.2022

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan, termasuk pembangunan desa dipengaruhi pada beberapa faktor seperti tenaga terlatih, biaya, informasi, peralatan, partisipasi, dan kewenangan yang syah. Kesemuanya sangat tergantung pada peran pemerintah untuk menggali, menggerakkan, dan mengkombinasikan faktor tersebut melalui peran administratif, hal ini karena pemerintah berperan sebagai administrator, komunikator dari semua jenjang pemerintahan. Dengan dan melalui kemampuan administratifnya, pemerintah dapat melakukan berbagai hal dalam rangka mewujudkan hasil pembangunan. Dimana perlu pemerintah mengambil prakarsa terlebih dahulu dalam bentuk pembangunan untuk masyarakat.

Pemerintah Desa Bangun Sari Kabupaten Muara Enim memikul beban tugas ganda yaitu dari atas dan dari bawah, kondisi ini mengharuskan adanya suatu kinerja organisasi yang kuat dan tangguh terutama dalam tugas-tugas pembangunan. Kemampuan administrative di bidang pembangunan adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui (dalam arti

melalui dan dengan dukungan) system-sistem pendukung pembangunan. Sistem-sistem tersebut adalah pelaksanaan tugas (*performance*), struktur (*structure*), dan hubungan dengan lingkungan (*environmental linkage*).

Kemampuan untuk melaksanakan tugas (kinerja) adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan atau yang hendak dicapai. Kemampuan ini meliputi kemampuan untuk merencanakan usaha untuk mencapai tujuan dan kemampuan untuk melaksanakan rencana tersebut. Dalam kemampuan untuk merencanakan usaha tersebut termasuk kemampuan untuk menggali, menggerakkan, dan mengkombinasikan masukan-masukan dari lingkungan dan menyiapkannya bagi sistem pelaksanaan tugas.

Implementasi peningkatan kapasitas SDM (*capacity building*) perlu dilakukan guna penguatan kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur. Dengan melakukan analisis manajemen melalui konsep SWOT serta pelaksanaan peningkatan kapasitas SDM pada organisasi Pemerintahan Desa Bangun Sari akan diketahui gambaran kinerja pemerintah pedesaan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang direncanakan. yang dalam hal ini pemberdayaan ekonomi di Desa Bangun Sari itu sendiri. Maka dengan latar belakang uraian tersebut di atas, penulis mengambil judul pada penelitian ini adalah "Peran Program Corporate Social Responsibility Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Bangun Sari Kabupaten Muara Enim".

Masalah Penelitian

Pemerintah Desa Bangun Sari selaku administrator pembangunan. khususnya pembangunan yang ada di wilayah Desa Bangun Sari harus memiliki kemampuan yang secara nyata dan rasional melaksanakan usaha dan memenuhi kebutuhan masyarakat atau mencapai sasaran pembangunan. Persoalannya adalah, apakah keadaan Pemerintahan Desa Bangun Sari saat ini telah memiliki kemampuan tersebut. Untuk mengetahui keadaan kinerja Pemerintahan Desa Bangun Sari tersebut, maka perlu diadakan penelitian atau kajian organisasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang menjadi masalah penelitian dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan program Corporate Social Responsibility dalam pemberdayaan ekonomi di Desa Bangun Sari.
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dan mendorong kinerja Pemerintah Desa Bangun Sari dalam pemberdayaan ekonomi.

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program Corporate Social Responsibility dalam pemberdayaan ekonomi di Desa Bangun Sari
2. Untuk mengetahui faktor penunjang dan penghambat kinerja Pemerintah Desa Bangun Sari dalam pemberdayaan ekonomi.

Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat atau masukan bagi berbagai kalangan baik akademis maupun praktisi pemerintahan khususnya pemerintah Desa di Desa Bangun Sari.
2. Diharapkan dapat berguna dalam pengembangan teori-teori ilmu kebijakan maupun manajemen pemerintahan baik secara mikro maupun makro.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemerintahan

Menurut Pamudji (1989), pemerintahan dalam arti luas adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional). Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit, adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam mencapai tujuan pemerintahan negara.

Selanjutnya Ndraha (1990) menyimpulkan bahwa pembangunan masyarakat atau pemberdayaan ekonomi adalah suatu proses. Baik ikhtiar masyarakat yang bersangkutan yang diambil berdasarkan prakarsa sendiri. maupun kegiatan pemerintah dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi, sosial dan kebudayaan berbagai komunitas, mengintegrasikan berbagai komunitas itu kedalam kehidupan bangsa, dan memampukan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya demi kemajuan bangsa dan negara, berjalan secara terpadu di dalam proses tersebut.

Pendapat lain dikemukakan oleh Brokensha dan Hodge dalam Gunardi dan Sarwiti (2003), dimana dalam perkembangannya pemerintah kolonial Inggris mengadopsi definisi pembangunan masyarakat yang lebih singkat pada tahun 1948, sebagaimana dilakukan ketika mereka memperkenalkan konsep pembangunan masyarakat di Malaysia yaitu:

Community development is a movement designed to promote better living for the whole community with the active participation and the initiative of the community.

Selanjutnya Gunardi dan Sarwiti (2003) mengemukakan bahwa pembangunan komunitas, secara sederhana, dapat diartikan menciptakan suasana kebersamaan atau mendorong orang untuk bekerjasama. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengembangkan aktivitas-aktivitas yang memungkinkan orang untuk bersama. Selain itu, kegiatan tersebut memang berguna bagi masyarakat dan menguntungkan apabila dikerjakan bersama sama.

Sementara itu, Zeithami, Parasuraman dan Berry (1990) mengemukakan bahwa kinerja pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui berbagai indikator yang sifatnya fisik. Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui aspek fisik pelayanan yang diberikan, seperti tersedianya gedung pelayanan yang representatif, fasilitas pelayanan berupa televisi, ruang tunggu yang nyaman, peralatan pendukung yang memiliki teknologi canggih, seperti seragam dan aksesoris serta berbagai fasilitas kantor pelayanan yang memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat.

Pelayanan Publik

Fungsi instansi pemerintahan sektor publik, adalah untuk memberikan pelayanan kepada publik. Sebelum sampai pada apa yang dimaksud dengan pelayanan publik, maka perlu dipahami terlebih dahulu makna dari pelayanan itu sendiri. Terdapat tiga makna dalam kosa kata pelayanan, yaitu perbuatan, pemenuhan kebutuhan, dan kemudahan. Dengan demikian, pada makna pelayanan ada kandungan unsur keaktifan dari sebuah perbuatan, yang artinya bukan suatu gerak aktivitas aktif. Keaktifan dapat berwujud kemampuan mencari tahu akan kebutuhan yang akan dilayani (Noor, 2001)

Azas-Azas Pelayanan Publik

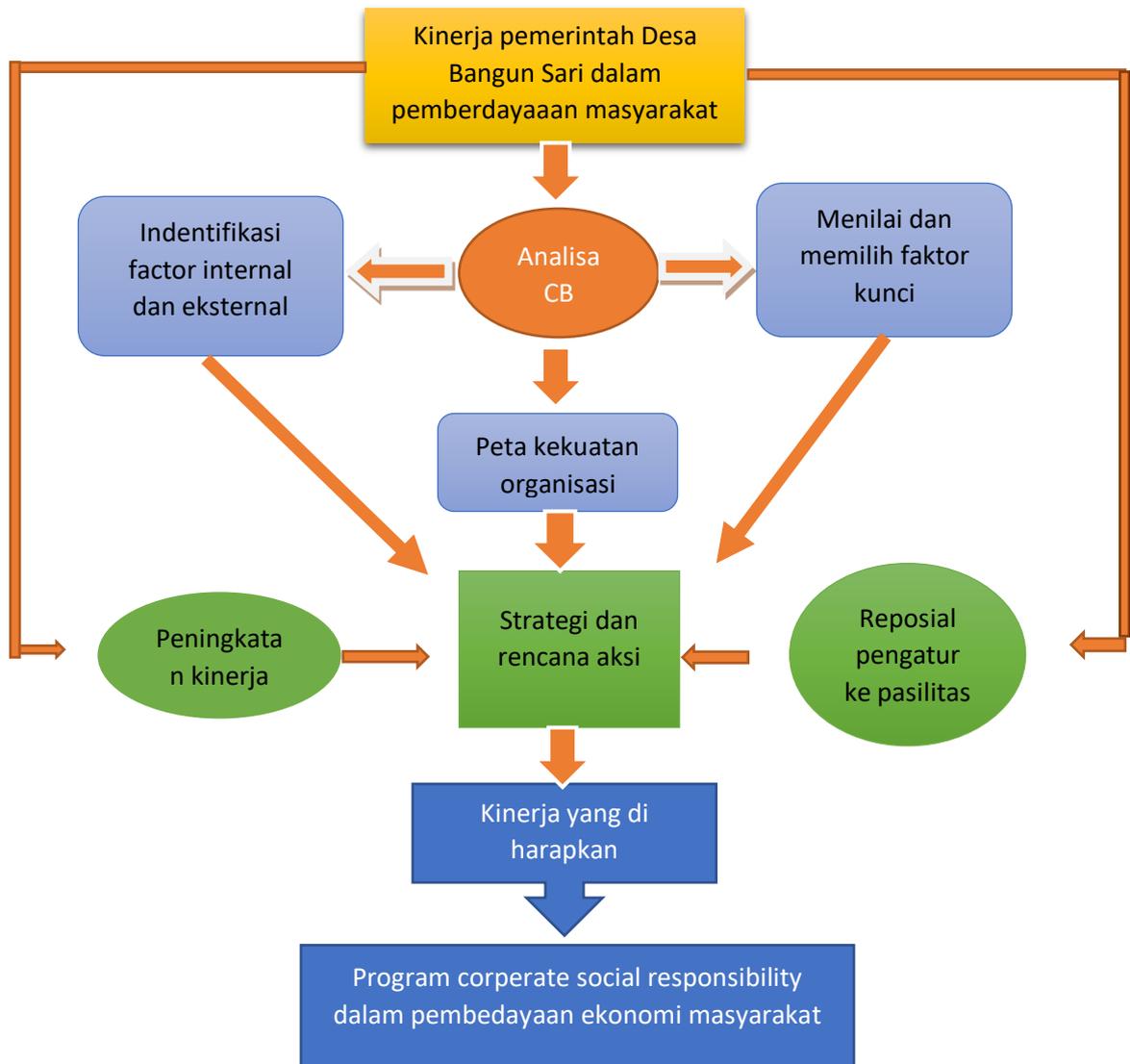
Mengingat berbagai fenomena pelayanan publik yang cenderung kurang berkualitas, dimana pelayanan yang diberikan oleh sektor publik terkesan terlalu mengada-ada, berbelit-belit, memakan waktu dan menyebalkan, maka diperlukan peningkatan kualitas pelayanan publik yang mengacu pada nilai-nilai "three E's" yaitu effectiveness, efficiency dan economy. Serta nilai "three R's" yaitu responsiveness, responsibility dan representatives serta tidak lupa nilai "tiga H" yaitu hukum yang adil, hukum yang jelas dan hukum yang pasti (JAN, 2001:20)

Dalam Peningkatan kapasitas di suatu komunitas masyarakat, harus disadari bahwa setiap masyarakat berbeda-beda. Mereka memiliki karakteristik budaya, geografi, sosial, politik, dan demografi yang unik, sehingga pengalaman pengembangan kapasitas di suatu komunitas masyarakat belum tentu dapat berjalan di masyarakat yang lain bahkan sangat beresiko mengalami kegagalan dan melemahkan pengalaman orang-orang dari masyarakat tersebut karena hal itu bukan proses yang cocok untuk mereka (Ife dan Tesoriero, 2008: 342).

Kerangka Pemikiran

Sasaran dari penelitian dalam tulisan ini adalah mengoptimalkan peranan pemerintah pedesaan dalam pembangunan masyarakat yaitu melalui pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur (capacity building) untuk mencapai peningkatan kinerja (performance) organisasi. Untuk meningkatkan kinerja tersebut maka terlebih dahulu harus diketahui bagaimana kinerja pemerintah pedesaan sekarang atau bagaimana peranan pemerintah pedesaan sekarang dalam pembangunan masyarakat.

Sacara skematis kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan dengan menyajikan kesamaan, perbedaan, keterkaitan, kategori, tema-tema pokok, konsep, ide dan analisis logika hasil awal. dan kelemahan atau gap dalam data (Keban, Hand Out, 1996). Analisis data dalam studi kasus dibangun bersama dalam proses interaktif. Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Reduksi data karenanya merupakan alat analisis, sebab tindakan-tindakan tersebut tidak lain merupakan pilihan-pilihan analisis. Data terlebih dahulu dirangkum. dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya sehingga dapat membantu dalam memberi kode kepada aspek aspek tertentu. Sebagai alat analisis, reduksi data dapat menajamkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu serta mengorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan demikian, data yang direduksi memberi gambaran lebih tajam tentang hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan.
2. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan/penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Membuat penyajian data juga merupakan sebuah langkah analisis data. Setelah data dibuat dalam bentuk tabel, bagan, matrik, dan grafik dilakukan tahapan dengan mendiskusikan selanjutnya memberikan penafsiran dan interpretasi. Memberikan interpretasi adalah memberikan arti yang lebih luas dari penemuan penelitian (Nazir, 1988: 437438).
3. Analisis statistik deskriptif yaitu penggunaan teknik statistik distribusi frekuensi dalam menganalisis data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner pada responden. Teknik ini digunakan untuk menyederhanakan penyajian data-data dari persepsi responden. Dengan demikian, penelitian descriptive research untuk menyederhanakan sesuatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang diteliti. Kemudian, dalam pengolahan dan analisis data, lazimnya menggunakan pengolahan statistik yang bersifat deskriptif.
4. Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan pemahaman atas informasi kemudian mencari makna dari catatan mengenai keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab akibat serta proposisi. Untuk itu, dalam penelitian kualitatif kesimpulan-kesimpulan yang diambil dengan longgar, tetap terbuka, skeptis sifatnya meskipun kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, dan kemudian meningkat menjadi lebih rinci serta mengakar dengan kokoh. Hal tersebut, sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum. Dalam kesimpulan penelitian kualitatif dilakukan sejak dimulainya proses kontak dengan unit analisis, lalu bersamaan dengan proses tersebut berlangsung kegiatan verifikasi yang kemudian menarik pokok pikiran ataupun memberi solusi dan tindakan yang perlu dilanjutkan setelah memperoleh hasil penelitian, sehingga dalam verifikasi dipikirkan kembali selama menulis ataupun suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan yang begitu seksama dan bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk membangun kesepakatan intersubjektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian Keadaan Wilayah dan Penduduk

Kabupaten Muara Enim terletak antara 4 sampai 6 Lintang Selatan dan 104 sampai 106" Bujur Timur, Luas wilayah Kabupaten Muara Enim 9.238,77 Km². Bentangan wilayah berbatasan dengan: Sebelah Utara dengan Kabupaten Musi Banyuasin, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Sebelah Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kota Palembang, Sebelah Barat dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Lahat.

Pendidikan Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim pada tahun 2011. jumlah pencari kerja sebesar 2.792 jiwa, yang memiliki latar belakang pendidikan SD (Sekolah Dasar) terdapat 80 jiwa, sedangkan yang tamat pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) sebanyak 18 jiwa. dan yang tamat pendidikan SMU atau sederajat terdapat 1.758 jiwa, Diploma dan Sarjana sebanyak 935 jiwa.

Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Muara Enim adalah sebesar 149.665 jiwa sedangkan jumlah pencari kerja pada Tahun 2011 menurut tingkat pendidikan dari SD sampai dengan sarjana tercatat 5.774 orang, dan hanya sebesar 1.560 yang sudah dapat ditempatkan. Sebenarnya jumlah pencari kerja jauh lebih besar dari jumlah tersebut, namun tidak tercatat di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muara Enim

Gambaran Desa Bangun Sari

Desa Bangun Sari merupakan salah satu desa dalam lingkungan Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim. Di sebelah Utara desa ini berbatasan dengan Desa Kayu Ara Sakti, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Suban Jeriji dan Desa Karang Raja, di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Penaggiran, dan sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumaja Desa Aur Duri.

Gambaran Umum PT. Medco E & P

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Bab | Pasal 1 mengenai Ketentuan Umum menyebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Peran PT. Medco E&P Lematang dalam pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Untuk mencapai tujuan pelaksanaan program Pengembangan Komunitas maka diperlukan strategi pencapaian terhadap sasaran dan prioritas program. Hal ini diwujudkan dalam indikator kinerja sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan masyarakat

Tujuan; Menurunkan tuntutan atau klaim masyarakat di sekitar wilayah operasi Perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan di Perusahaan. Indikator:

- a. Menurunnya tuntutan masyarakat yang berkaitan dengan tenaga kerja
- b. Menurunnya tuntutan masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan,

2. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Tujuan: Meningkatkan perbaikan kondisi lingkungan hidup.

Indikator:

- a. Menurunnya penggunaan bahan kimiawi dalam kegiatan pertanian disekitar wilayah operasi Perusahaan
- b. Menurunnya tingkat pembakaran lahan oleh petani di sekitar wilayah operasi Perusahaan
- c. Meningkatnya kesadaran masyarakat sekitar wilayah operasi dalam penggunaan pestisida organik untuk kesuburan tanah dan keseimbangan ekosistem tanah
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penggunaan sumber daya alam lokal secara bijaksana kesehatan dengan
- e. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang peningkatan gizi keluarga dan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat.

3. Peningkatan kapasitas masyarakat

Tujuan: Meningkatkan kemampuan, kompetensi, dan keterampilan masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Indikator:

- a. Menurunnya jumlah pengangguran di wilayah sekitar operasi Perusahaan
- b. Meningkatnya kesadaran untuk mengembangkan diri melalui pelatihan keterampilan
- c. Masyarakat berperan dalam pengembangan program dengan menjadi pelatih dan pendamping.

4. Pemberdayaan masyarakat

Tujuan: Meningkatkan peran serta atau pelibatan masyarakat sekitar wilayah operasi Perusahaan dalam pelaksanaan program Pengembangan Komunitas. Indikator:

- a. Peran serta masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program
- b. Pelibatan masyarakat dalam pengembangan usaha.

5. Kemandirian masyarakat

Tujuan: Menjadikan masyarakat mengembangkan usaha secara mandiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal.

Indikator:

- a. Berkurangnya tingkat ketergantungan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup
- b. Berkembangnya usaha-usaha kecil masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam untuk menambah penghasilan.

6. Peningkatan kerja sama antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah

Tujuan; Meningkatnya kolaborasi antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah daerah dalam pengembangan program yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indikator:

- a. Adanya kesepakatan kerjasama antara perusahaan dan pemerintah daerah. untuk program Pengembangan Komunitas
- b. Penyusunan program Pengembangan Komunitas melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan sehingga kualitas dan kuantitas program dapat dicapai secara optimal
- c. Pelaksanaan Multi-Stakeholder Engagement.

7. Kesejahteraan masyarakat

Tujuan: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui penambahan penghasilan dengan pemanfaatan sumber daya lokal dan peningkatan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat.

Indikator:

- a. Tingkat ekonomi masyarakat yang lebih baik
- b. Terciptanya pola hidup sehat di masyarakat
- c. Tingkat kemandirian masyarakat yang baik.

Tahapan Pelaksanaan Program

Program kerja Pengembangan Komunitas disusun secara sistematis, terencana, terpadu serta bermuatan capacity dan institutional building untuk memperkuat akses masyarakat dalam mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas hidup yang lebih baik. Fokus program kerja terdapat lima, yakni:

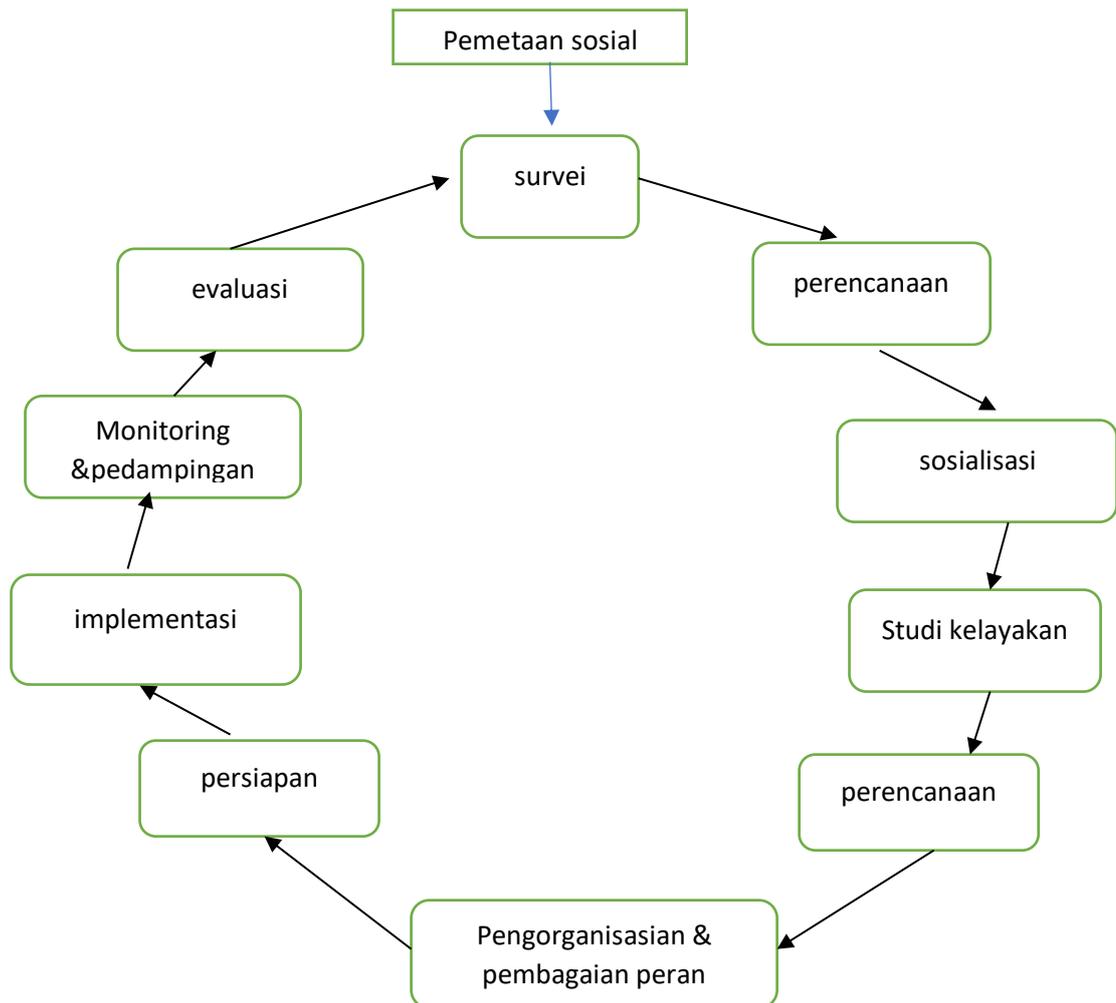
1. Ekonomi
2. Pendidikan dan kebudayaan
3. Kesehatan
4. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
5. Lingkungan

Kelima fokus program dilaksanakan dalam tahapan:

1. Jangka pendek yakni program dalam satu tahun anggaran
2. Jangka menengah berupa program keberlanjutan yang dirancang sebagai kesatuan komprehensif dengan pelaksanaan program jangka pendek
3. Jangka panjang sebagai program terkait kemandirian kelompok sasaran dan kesinambungan operasional Perusahaan.

Proses Pelaksanaan Program

PT Medco E&P Indonesia - Blok South Sumatera Extension menerapkan proses manajemen program Pengembangan Komunitas secara tertib. Perusahaan melibatkan partisipasi para pemangku kepentingan atau stakeholders sehingga kualitas dan kuantitas program dapat dicapai secara optimal. Untuk pelibatan pemangku kepentingan lain, Perusahaan menggunakan model Multi-Stakeholder Engagement. Alur proses pelaksanaan program yang memadukan proses manajemen dan model Multi-Stakeholder Engagement adalah sebagai berikut:



Evaluasi Pemberdayaan

UNDP (2002) mendefinisikan evaluasi sebagai kegiatan selektif yang mengkaji perkembangan dan pencapaian suatu hasil secara sistematis dan objektif. Dalam sebuah program, evaluasi tidak hanya dilakukan satu kali namun penilaian dilakukan berulang dan dilaksanakan berdasarkan lingkup dan kedalaman yang berbeda pada beberapa tahapan waktu untuk menilai pencapaian pengetahuan dan pembelajaran dalam upaya pencapaian hasil (outcome).

Evaluasi pemberdayaan didefinisikan sebagai pendekatan evaluasi yang mengarah pada upaya meningkatkan kemungkinan keberhasilan program pemberdayaan yang lebih baik (Wandersman dalam pencapaian Fetterman, 2007). Fetterman (2007) juga menjelaskan bahwa evaluasi pemberdayaan adalah merupakan proses untuk mendapatkan gambaran diri melalui evaluasi dan refleksi diri dalam tataran individu ataupun grup guna meningkatkan kualitas dirinya melalui inisiatifnya sendiri.

Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Desa Bangun Sari

Kegiatan Corporate Social Responsibility di Desa Bangun Sari telah dilaksanakan mulai tahun 2004 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (Satker PIP) Desa bangun sari dan pelaksanaannya di bawah kendali Kepala Desa, sedangkan mulai tahun 2010 pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Desa Bangun Sari ditangani oleh bagian Humas PT. Medco E&P.

Kegiatan CSR telah terlaksana semua, mulai dari sosialisasi awal, perekrutan relawan, pemetaan swadaya, refleksi kemiskinan, pembentukan BKM, penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanganan Kemiskinan (PJM Pronangkis), pelatihan-pelatihan dan peaksanaan kegiatan-kegiatan lapangan.

Kegiatan fisik lingkungan pada program Corporate Social Responsibility di Desa Bangun Sari adalah pengaspalan jalan lingkungan, pembangunan MCK, pembuatan saluran drainase, reklamasi tanah, pendirian bangunan Kantor Badan keuangan Desa, pendirian klinik desa, pembangunan irigasi pertanian, penyediaan air bersih, pavingisasi jalan lingkungan, pembuatan senderan jalan, penerangan jalan dan penataan sanitasi lingkungan.

Kegiatan dalam bidang ekonomi yaitu pengelolaan dana bergulir untuk kepentingan usaha kecil dan mikro dan untuk kepentingan warga miskin. Dalam bidang sosial yang telah dilakukan adaah pelatihan kerajinan batu, pelatihan pembuatan besi kolom, penyewaan layos, khitanan missal, penyuluhan penanggulangan narkoba, penyuluhan kesehatan ibu hamil, penyuluhan KB, fogging untuk pemberantasan penyakit demam berdarah, penyediaan pupuk untuk petani, pelayanan pengobatan gratis, pendirian program pake B dan C, kursus computer, beasiswa bagi anak kurang mampu dan pendiirian perpustakaan desa.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis baikmaupunsecara kuantitatif secara kualitatif serta pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakikat program pemberdayaan adalah pembelajaran bagi masyarakat, sehingga bisa dikatakan bahwa elemen utama dari pemberdayaan adalah pengembangan kapasitas masyarakat itu sendiri. Rangkaian pengembangan kapasitas dalam Corporate Social Responsibility yang terdiri dari kegiatan sosialisasi, pelaksanaan siklus, dan pelatihan di Desa Bangun Sari telah dijalankan dengan baik, dengan menggunakan pendekatan sosio-

kultural yaitu dengan memperhatikan aspek keagamaan, aspek gender dan kebiasaan sehari-hari masyarakat.

2. Faktor Sikap dan cara pandang masyarakat Desa Bangun Sari terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat tergolong baik atau tinggi. Sikap dan cara pandang masyarakat tersebut secara umum tidak dipengaruhi oleh golongan usia, tingkat pendidikan dan perannya dalam kegiatan program namun lebih banyak dipengaruhi oleh jenis kelamin. Kualitas keterlibatan, peran dan tanggapan kaum perempuan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat masih lebih.

Saran

1. Pemberdayaan masyarakat adalah proses yang berkelanjutan sehingga evaluasi pemberdayaan masyarakat sebaiknya dilakukan secara bertahap dimulai dari sebelum program dilaksanakan, awal pelaksanaan program, dan evaluasi periodik setelah pelaksanaan program, untuk itu diperlukan studi lebih lanjut mengenai evaluasi pemberdayaan pada tiap-tiap tahapan dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut.
2. Pemberdayaan masyarakat pada tiap-tiap komunitas adalah bersifat unik atau berbeda antar satu komunitas dengan yang lainnya, untuk itu indikator pemberdayaan masyarakat yang digunakan juga harus menyesuaikan dengan karakteristik komunitas itu dan karakteristik program yang dijalankan. Untuk itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai indikator pemberdayaan masyarakat khusus untuk kasus-kasus tertentu dan indikator-indikator umum untuk semua program pemberdayaan.
3. Masyarakat selaku pelaksana program pemberdayaan belum sepenuhnya mempunyai keberdayaan dan tingkat kemandirian yang cukup untuk mengelola pembangunan dalam komunitasnya, untuk itu peran dan keberadaan fasilitator pendamping masih diperlukan dan harus tetap dipertahankan sampai masyarakat benar-benar terbiasa dengan proses pemberdayaan yang dijalankan serta telah menjadi budaya bagi masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Robert, 2003, *Social Work and Empowerment*, New York: Palgrave Macmillan.
- Adi, Isbandi Rukminto, 2008, *Intervensi komunitas/ pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Rajawali Pers
- Adler, Patricia A dan Adler, Peter, 2009, *Teknik-teknik Observasi, Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Bartle, Phil, 2007. *Elements of Community Strength* <http://www.sen.org/mpfc/modules/mea-elin.htm> *Measuring*
- Cousins, J. Bradley, 2005. *Will The Real Empowerment Evaluation Please Stand Up?: A Critical Friend Perspective*, *Empowerment Evaluation: Principles in Practice*, New York: The Guilford Press
- Fetterman, David and Wandersman, Abraham, 2007, *Empowerment Evaluation: Yesterday, Today, and Tomorrow*, *American Journal of Evaluation* 2007;28; 179.
- Fontana, Andrea dan Frey, James H. 2009, *Wawancara Seni Ilmu Pengetahuan, Handbook of Qualitative Research*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Foy. Nancy, 1994, *Empowering People at Work*, London: Grower Publishing Company
- Fujikake, Yoko, 2008, *Qualitative Evaluation: Evaluating People's Empowerment*, *Japanese Journal of Evaluation Studies*, Vol 8 No 2, 2008, pp 25-37, Japan Evaluation Society

Guijt, Irene, 2000, Methodological Issues in Participation Monitoring and Evaluation, Learning From Change Issues and Experiences in Participatory Monitoring and Evaluation, Canada: ITDG Publishing

Gulo, W. 2002, Metodologi Penelitian, Jakarta: Penerbit PT Grasindo.